

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai pengaruh pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bobe Bolango, disimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Besar hasil koefisien determinasi dari variabel pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 39.8%. Hal ini menjelaskan bahwa adanya pengetahuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang anggaran terhadap perencanaan/pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD dapat meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal pengawasan keuangan daerah.

#### **1.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, jika ingin meneliti mengenai Pengaruh pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah agar lebih mengembangkan lagi variabel-variabel penelitian yang akan digunakan

dalam penelitian demi untuk menemukan variabel lain yang lebih berpengaruh kuat terhadap pengawasan keuangan daerah.

2. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu adanya tingkat kesibukan yang dimiliki oleh responden, sehingga dalam pengisian kuisisioner terkadang responden terburu-buru dalam mengisinya tanpa membaca dengan teliti setiap pernyataan yang diajukan dalam kuisisioner. Selain itu adanya kendala bersifat inheren dengan metode kuisisioner terutama berkaitan dengan perasaan senang dan tidak senang, keseriusan dan faktor situasional lain ketika responden memberikan jawaban. Sehingga kedepan untuk peneliti yang ingin melaksanakan penelitian dengan topik yang sama agar lebih memperhatikan proses dalam memperoleh data dilapangan agar didapatkan data yang benar-benar terpercaya.
3. Diharapkan peneliti dapat mengawasi pengisian kuisisioner secara langsung sehingga memberikan informasi yang mendekati keadaan yang sebenarnya dan mampu mengembangkan sampel yang lebih luas untuk anggota DPRD kabupaten atau bahkan DPRD provinsi dan pusat.
4. Untuk anggota DPRD sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan semaksimal mungkin sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar jika didukung oleh pengawasan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, Revision. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*: Yogyakarta: BPFE
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD): *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*
- Elizal dan Bambang. 2009. Analisis Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah: *Jurnal riset akuntansi dan bisnis vol. 9*
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi: 4. BP Universitas Deponegoro: Semarang
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (edisi pertama)*: Jakarta . Salemba 4
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah (edisi 3)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1): 53-64
- Hence, Paat. 2015. *APBD Bone Bolango 2016 Disahkan*: From <http://gorontalo.antaraneews.com/berita/20450/apbd-bone-bolango-2016-disahkan>. (15 Januari 2016)
- Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat): *Jurnal*.
- Kurnia dan Efrizal. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi

Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik: *Jurnal WRA*, Vol. 1, No. 1 April 2013

Moekijat. 1979. *Motivasi dan Pengembangan Manajemen*. Bandung: Alumni

Nasru, Alam. 2011. *Pelaku Korupsi APBD Bone Bolango Divonis*: From file:///D:/File%20Skripsi/penting/dua%20huruf/revisi/Pelaku%20Korupsi%20APBD%20Bone%20Bolango%20Divonis%20%20Kompas.com.htm. (30 Maret 2016)

Novietta. 2010. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Pengetahuan Eksekutif Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah: *Jurnal Keuangan dan Bisnis Volume 2 No. 1, Maret 2010*

Nurul, Amalia. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo): *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang

Pramono, A,H., 2002, *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang

Republik Indonesia. 2000. *Keuangan Negara pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000*

\_\_\_\_\_. 2001. *Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

\_\_\_\_\_. 2003. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*

\_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara*

\_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_. 2005. *Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Ridwan, 2008. *Metode dan Teknik menyusun Tesis*: Alfa Beta Bandung
- Rosalina, Pebrica. 2012. *Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating: Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi. Vol. 2. No. 1*
- Saleba. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Setda Kota Baubau): *Skripsi*. Universitas Hasanudin Makassar
- Santoso, Urip. Pambelum, Yohanes. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud: *Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.4, No.1: hal. 14–33, (ISSN:0216–1249)*
- Setyawati, Yuni. 2010. Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris di Karesidenan Surakarta): *Tesis S2*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Simson, W., Imam, G., Nasir, M. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua): *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*.
- Sudiarta. Sulindawati. Sujana. 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderating (Studi Empiris pada Lembaga Dprd Kabupaten Buleleng): *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 )*
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyuningsih, Sri. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan (APBD) Dengan Akuntabilitas Sebagai

Variabel *Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Gowa): Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006): *Prosiding SNA X*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Wendy, Sundari, Rossel. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik: (Studi Kasus pada DPRD Se Eks Karesidenan Surakarta)
- Vinola Herawaty. 2008. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, VOL. 10, NO. 2, NOVEMBER 2008: 97-108*
- Yulinda. Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu): *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*
- Yuni, Setyawati. 2010. Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris di Karesidenan Surakarta): *Tesis S2*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret: Surakarta